

Sikap Indonesia Terkait dengan Serangan Amerika Serikat ke Afghanistan 2001

Audita Chiquita Putri – 071311233065

Program Studi S1 Hubungan Internasional, Universitas Airlangga

ABSTRAK

Serangan yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Afghanistan dengan dalih untuk menangkap pelaku teror 9/11 mengundang reaksi kuat dari Indonesia. Kecaman terhadap serangan Amerika Serikat ini dikeluarkan oleh Indonesia atas tuntutan berkepanjangan dari berbagai pihak di dalam negeri. Adanya berbagai tekanan yang dilakukan Amerika Serikat nyatanya tidak mampu mempengaruhi keputusan Indonesia. Hal ini yang kemudian menjadi dasar dari penelitian ini, yakni untuk menemukan alasan mengapa Indonesia lebih memenuhi tekanan domestik dibandingkan dengan tekanan Amerika Serikat. Dengan menggunakan teori kebijakan luar negeri dan intermestik, peneliti menemukan hal-hal baru yang menunjukkan bahwa tekanan domestik dapat mempengaruhi sikap atau kebijakan negara demokrasi terkait suatu hal. Terlebih lagi, transisi demokrasi yang terjadi di Indonesia pasca runtuhnya kejayaan Orde Baru telah membawa Indonesia menjadi negara yang lebih mendengarkan suara masyarakatnya. Sehingga penelitian ini pun berakhir dengan hasil bahwa Indonesia lebih mengutamakan tekanan domestik karena telah terjadi proses demokratisasi di dalam negeri yang kemudian memunculkan aktor-aktor baru yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam pengambilan keputusan.

Kata Kunci: *Amerika Serikat, demokrasi, Indonesia, intermestik, kebijakan luar negeri, tekanan domestik*

The attack United States did towards Afghanistan in order to catch the terrorist who did the 9/11 terror invented strong reaction from Indonesia. The critique Indonesia gave towards United States was based on all the pressure from various domestic actors. Although the United States also gave pressure, but in fact it couldn't affect Indonesia's decision. This fact then become the base of this thesis, that is to find the reason why Indonesia preferred to fulfil the domestic pressure rather than the pressure United States gave. By using foreign policy theory and intermestic theory, the writer found new things that show how domestic pressure could affect attitude or policy of a democratic country related to one issue. Even more, the democratic transition that happened Indonesia after the New Order regime fell has brought Indonesia to be a country that listens more to their citizens. This research end up with a result that the democratization inside Indonesia had brought up new actors who became government's consideration to make a decision.

Keywords: *democracy, domestic pressure, foreign policy, Indonesia, intermestic, United States*

Hanya beberapa jam setelah terjadinya serangan 9/11, ahli *counter-terrorism* Amerika Serikat mengumumkan bahwa Amerika Serikat telah melakukan penyadapan elektronik guna mencari dalang dibalik serangan 9/11 tersebut. Dari penyadapan elektronik ini ditemukan bukti bahwa Osama bin Laden, yang merupakan militan Islam yang sangat kaya, bersama dengan kelompok terorisnya yakni Al-Qaeda telah menetap dan secara bersamaan dilindungi oleh Afghanistan di bawah perintah kelompok Taliban (Jacobson & Colon, 2008: 5). Ditemukannya bukti seperti ini kemudian mendorong Amerika Serikat untuk menyusun strategi guna memburu kelompok yang bertanggung jawab atas serangan 9/11 yang telah menewaskan ribuan warga Amerika Serikat. Amerika Serikat kemudian mulai melakukan pemburuan terhadap Osama bin Laden dan juga Mullah Mohammed Omar, yang merupakan pemimpin Taliban dan dianggap sebagai pemimpin Afghanistan (Jacobson & Colon, 2008: 5). Keduanya dianggap tengah bersembunyi di Afghanistan. Pemburuan ini berujung pada serangan udara ke Afghanistan yang dilakukan Amerika Serikat pada Oktober 2001.

Pada 14 September 2001, tiga hari setelah serangan 9/11, Senat Amerika Serikat melakukan *voting* dengan hasil 98 – 0 untuk memberikan wewenang kepada Presiden Bush untuk menggunakan seluruh pasukan yang dibutuhkan sebagai respon dari serangan 9/11 itu sendiri. Hal ini juga didukung oleh House of Representative dengan hasil *vote* 420 – 1 (Jacobson & Colon, 2008: 7). Dengan keputusan ini, Presiden Bush secara otomatis mendapatkan wewenang untuk terus memerintahkan pemburuan akan dalang dibalik serangan 9/11. Sehari setelah *voting* dilakukan di Senat dan House of Representative, melalui penyadapan elektronik yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat, diketahui bahwa Mullah Mohammed Omar mengatakan bahwa Osama bin Laden akan jadi orang terakhir yang meninggalkan Afghanistan (Jacobson & Colon, 2008: 8). Hal ini kemudian menjadi bukti yang lebih meyakinkan bagi Amerika Serikat bahwa Taliban memang melindungi Osama bin Laden di Afghanistan.

Dalam mengubah pandangannya mengenai *War on Terror*, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri tidak serta merta melakukannya tanpa pertimbangan yang panjang. Penelitian ini dilakukan guna menelusuri lebih lanjut alasan Indonesia untuk lebih memenuhi tekanan publik domestik untuk mengecam serangan Amerika Serikat ke Afghanistan dibandingkan dengan tekanan Amerika Serikat untuk mendukung *War on Terror*. Mengingat tujuan awal dilakukannya penelitian ini, maka merupakan hal yang sepatutnya dilakukan untuk mengangkat teori kebijakan luar negeri dalam penelitian ini. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa keputusan Indonesia untuk mengubah posisinya ini dapat dikatakan sebagai sebuah kebijakan luar negeri, dimana masyarakat Indonesia juga mempengaruhi pembuatan kebijakan tersebut.

Dalam menganalisis latar belakang terbentuknya suatu kebijakan luar negeri, terdapat alat bantu yang dapat digunakan, yakni *Level of Analysis* (LoA). LoA merupakan seperangkat alat yang membantu penulis untuk mempelajari suatu subjek. LoA negara berfokus pada faktor-faktor internal negara yang memaksa negara untuk terlibat dalam perilaku kebijakan luar negeri yang spesifik. Analisis semacam itu mencakup kerangka kelembagaan negara seperti hubungan antara cabang eksekutif dan legislatif pemerintah, organisasi birokrasi pemerintah, sistem pemerintahan yang dianut negara, konstituensi domestik seperti kelompok kepentingan, kelompok etnis, atau opini publik secara lebih umum, kondisi ekonomi, dan juga sejarah nasional negara, dan budaya (Breuning, 2007: 11). Pada tingkat analisis ini, penekanannya adalah bagaimana faktor internal negara mempengaruhi perilaku negara tersebut di panggung global.

Teori selanjutnya yang penulis gunakan ialah teori intermestik. Jika dilihat dari namanya, teori ini berasal dari dua kata, yakni “internasional” dan “domestik”. Hal ini kemudian dengan mudah menggambarkan pandangan dari teori intermestik ini. Telah diakui bahwa karena kekuatan internasional telah mengubah secara mendalam aspek-aspek politik, militer, ekonomi, dan normatif dari struktur negara, setiap analisis tentang hal-hal domestik, seperti pembentukan kebijakan dan lain sebagainya, tidak memadai jika tidak dihubungkan ke hal-hal internasional, dan begitu pula sebaliknya (Sorensen, 2001). Hal ini merupakan suatu hal yang masuk akal, mengingat di era seperti sekarang ini, hal-hal domestik selalu mempengaruhi hal-hal internasional, dan begitu pun sebaliknya. Penulis berargumen bahwa globalisasi sebagai sebuah proses telah membuat semakin banyak isu kebijakan menjadi masuk dalam ranah intermestik daripada murni sebagai isu domestik atau isu internasional tersendiri.

Intermestik ialah sebuah teori yang membahas adanya keterkaitan antara dua hal yang tumbuh dan berkembang secara berbeda, yakni internasional dan domestik. Kedua hal ini kemudian memberi bobot pada masing-masing sisi yang akan mempengaruhi keduanya. Istilah intermestik itu sendiri adalah sebuah hal baru yang terbentuk dari sisi internasional dan sisi domestik dari situasi politik modern di masa kini yang sekarang telah membaaur menjadi satu (Snow & Haney, 2003: 5). Dalam Hubungan Internasional, terdapat sebuah pernyataan bersejarah yang menyatakan bahwa kebijakan luar negeri berasal dari pemisahan dua bidang, yakni kebijakan luar negeri dan dalam negeri. Dari pernyataan ini kemudian digambarkan bahwa kebijakan luar negeri tidak mempengaruhi politik dalam negeri, dan begitu pula sebaliknya. Tetapi hal itu tidak berlaku lagi dalam kebanyakan kasus yang terjadi di era globalisasi ini (Snow & Haney, 2003: 5). Adanya aktor-aktor baru yang memberikan pengaruh pada kebijakan luar negeri adalah karakteristik lingkungan internasional dan domestik yang membantu menciptakan dan mendefinisikan sebuah fenomena intermestik. Adanya intermestik ini merupakan salah satu karakteristik yang mendasari kebijakan luar negeri kontemporer.

Proses Demokratisasi di Indonesia: Era Orde Baru hingga Pasca Reformasi

Masa pemerintahan Presiden Soeharto dikenal sebagai masa dimana demokrasi di Indonesia mengalami masa yang surut karena tekanan yang keras dari pemerintahan Soeharto yang otoriter. Pada era ini, eksekutif memegang peranan yang amat dominan. Kekuasaan eksekutif begitu dominan terhadap semua aspek kehidupan dan pemerintahan di dalam negara, mulai dari terhadap kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif hingga opini publik dan media massa. Salah satu hal yang menjadi gambaran nyata bahwa proses demokrasi tidak berjalan baik di era Orde Baru ialah adanya peraturan bahwa presiden juga memiliki kewenangan untuk menentukan keanggotaan MPR. Peraturan ini tercantum dalam UU No.2 Tahun 1985 (Kemenkumham, 2017). Hal ini kemudian menjadi salah satu gambaran sebagaimana demokrasi tidak dijalankan dengan baik dan benar di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Hal berikutnya yang menonjol pada era Orde Baru ialah saat kursi-kursi tinggi di pemerintahan diduduki oleh para pejabat militer Indonesia. Bukan rahasia lagi bahwa Presiden Soeharto menjalin hubungan dekat dengan militer, mengingat latar belakangnya yang juga berasal dari militer. Hal ini kemudian menjadi alasan utama adanya dukungan besar yang ditujukan oleh angkatan bersenjata Indonesia terhadap pemerintahan Presiden Soeharto (Anwar, 2010: 128).

Pemerintahan Orde Baru merupakan pemerintahan yang menerapkan paham anti komunis sebagai ideologi dan otoriter dalam politiknya (Anwar, 2005: 203). Pemerintahan Soeharto percaya bahwa cara terbaik untuk mencegah terjadinya persebaran komunisme di Indonesia ialah dengan mengembangkan perekonomian negara dan untuk mengembangkan perekonomian negara ini, harus terlebih dahulu dicapai kestabilan politik. Guna mencapai

sebuah kestabilan politik di dalam negara, pemerintah Orde Baru memperketat partisipasi politik dan melakukan kontrol yang amat ketat terhadap aktivitas-aktivitas sosial dan politik secara keseluruhan. Dalam langkahnya memperketat partisipasi politik, pemerintah Orde Baru mengurangi peranan DPR dan MPR yang kemudian diungkapkan Dewi Fortuna Anwar sebagai “nothing more than a rubber stamp for the executive” (Anwar, 2005: 203).

Orde Baru memberlakukan penguasaan atas media dengan mewajibkan dua jenis lisensi, yakni Surat Izin Percetakan dan Surat Izin Penerbitan (Toeti, 2007: 63). Adanya ketetapan ini menuntun media ke dalam sebuah sistem yang dapat disebut 'pensoran diri' dimana seorang jurnalis atau editor harus tahu jenis konten apa yang dapat menyebabkan salah satu lisensi ini dicabut. Secara khusus, wartawan harus berhati-hati untuk tidak menulis artikel yang menyentuh topik larangan, seperti SARA (suku, agama, ras, antar-golongan). Kemudian, pada tahun 1982, Kementerian Informasi mengeluarkan peraturan baru bahwa semua media juga harus memperoleh Izin Usaha Publikasi Pers dan semua wartawan harus bergabung dengan Asosiasi Wartawan Indonesia (AWI), yang dewan tingginya terdiri dari orang-orang yang mewakili pemerintahan Soeharto (Toeti, 2007: 63). Terdapat pula sebuah budaya yang disebut dengan 'budaya telepon' yang mulai berlaku saat Kementerian Informasi atau Kementerian Pertahanan dan Keamanan mengeluarkan perintah mereka melalui telepon kepada editor dan pemilik media massa untuk tidak menerbitkan berita tertentu, melaporkan insiden tertentu, atau menyebarkan fakta dan informasi sensitif (Toeti, 2007: 63). Pada era Orde Baru terdapat beberapa kali pencabutan izin pers oleh pemerintah. Di antaranya ialah pencabutan surat kabar seperti Indonesia Raya dan Pedoman Nusantara. Izin kedua media massa ini dicabut dengan alasan telah mengkritik kebijakan pemerintah dan melaporkan skandal korupsi pejabat pemerintah.

Dengan tujuan untuk tidak melakukan kesalahan yang dilakukan Presiden Soeharto dalam pemerintahan otoriter yang dijalankannya, Presiden Habibie melanjutkan misi utama bangsa Indonesia, yakni menjadi negara demokrasi yang seutuhnya. Hal ini kemudian diwujudkan dengan melakukan beberapa hal yang menjadi perubahan politik berarti di Indonesia. Presiden Habibie mengurangi peran militer di era reformasi jika sebelumnya di era Orde Baru militer sangatlah berkuasa. Lebih lanjut, Presiden Habibie juga menekankan dan memaksakan bahwa militer harus netral secara politik, tidak memihak suatu pihak tertentu, dan juga tidak tergabung dalam partai politik manapun. Di samping itu, hal yang dapat dikatakan paling menonjol pada era awal reformasi ini ialah adanya izin untuk mendirikan partai politik secara terbuka bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali (Anwar, 2005: 221). Hal ini kemudian dituangkan menjadi RUU yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik. Adanya perubahan ini kemudian menimbulkan pertumbuhan partai politik yang masif di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan terdapatnya 48 partai politik yang turut berpartisipasi dalam pemilihan umum pada tahun 1999.

Pasca turunnya Presiden Soeharto, terdapat beberapa perubahan maupun penambahan di dalam UUD 1945. Salah satu penambahan yang menjadi perhatian ialah diterbitkannya UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Di dalam Pasal 1 UU tersebut disebutkan bahwa “setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok dapat menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara” (DPR, 2017). Kebebasan suara masyarakat, yang termasuk di dalamnya ialah kebebasan media dan pers, merupakan salah satu hal yang dituntut untuk ada di sebuah negara demokrasi. Mengingat pada era Orde Baru kebebasan berpendapat dan kebebasan pers mendapatkan tekanan dari pemerintah, maka munculnya UU tentang kebebasan berpendapat ini merupakan hal baik. Hal ini menggambarkan adanya keinginan sungguh-sungguh dari pemerintah untuk membawa Indonesia menjadi negara demokrasi yang seutuhnya. Guna menjamin adanya kebebasan pers di era Reformasi, pemerintah mengeluarkan UU tersendiri yang membahas mengenai pers di Indonesia. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers disahkan pada tanggal 23 September 1999, 16 bulan setelah lengsernya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan.

Pada UU No. 40 Tahun 1999 Pasal 4 Ayat 1 disebutkan bahwa kebebasan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara (DPR, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran kebebasan pers akan serta merta melanggar undang-undang negara. Kemudian dalam UU yang sama juga disebutkan bahwa pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau larangan penyiaran sekalipun seperti yang kerap kali terjadi pada era Orde Baru.

Poin berikutnya yang harus digarisbawahi dalam proses demokratisasi di Indonesia ialah adanya keseriusan pemerintah untuk mengadakan pemilihan umum yang baik dan transparan. Hal ini diwujudkan dengan cara mengeluarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa pemilihan umum yang benar-benar demokratis telah diusung di Indonesia dan pemerintah berusaha untuk melaksanakannya sebagaimana mestinya. Pemilihan umum ini dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Tingkat I dan II, dan juga MPR. Berbicara mengenai proses demokratisasi, tidak layak jika melupakan adanya peranan MPR dan DPR. Jika pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, peranan dari lembaga-lembaga tersebut tidak begitu terlihat, tetapi sejak turunnya Presiden Soeharto, peran MPR dan DPR menjadi lebih besar. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, lembaga-lembaga ini dikatakan hanya ada sebagai formalitas belaka, tanpa menjalankan fungsi yang seharusnya. Dikeluarkannya UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD seakan-akan menjadi titik awal diberhentikannya sistem demokrasi yang tidak berjalan semestinya pada era Orde Baru.

Beralihnya Indonesia dari era Orde Baru ke era Reformasi menandakan bahwa Indonesia tengah memasuki babak baru dalam proses demokratisasi. Dikeluarkannya berbagai UU di era Reformasi yang terkesan berbeda dari pemerintahan sebelumnya dapat dijadikan bukti nyata bagaimana keinginan pemerintah Indonesia yang baru untuk membawa Indonesia menjadi negara yang lebih demokratis. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah pada era Reformasi ini juga terus dijadikan pedoman bagi presiden-presiden yang menjabat setelah Presiden B.J. Habibie, tidak terkecuali Presiden Megawati Soekarnoputri. Hal ini dapat digambarkan dengan tidak adanya perubahan beberapa UU yang dikeluarkan pada tahun 1999 di masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Hingga munculnya sikap Indonesia yang mengecam serangan Amerika Serikat ke Afghanistan pada Oktober 2001, seluruh UU yang telah penulis tuliskan di atas masih diberlakukan oleh pemerintah. Hal ini kemudian dapat menggambarkan peran besar yang dimiliki masyarakat, media, hingga parlemen pada masa pemerintahan Presiden Megawati tersebut.

Tekanan Amerika Serikat Terkait *War on Terror*

Amerika Serikat mengeluarkan doktrin *War on Terror* yang juga ditujukan untuk merangkul negara-negara untuk memerangi terorisme. Untuk melancarkan jalannya *War on Terror* ini, Amerika Serikat melakukan tekanan-tekanan yang ditujukannya untuk negara-negara di dunia agar negara-negara ini mau bergabung dengan aksi *War on Terror* Amerika Serikat ini. Munculnya *Bush Doctrine* menjadi salah satu tekanan yang diberikan Amerika Serikat. Dalam *War on Terror* ini, Presiden Bush menyatakan bahwa Amerika Serikat menentang segala tindakan yang berkaitan dengan terorisme dan mengecam negara yang mendukung keberadaan dan berkembangnya terorisme tersebut. Presiden Bush menyatakan bahwa “every nation, in every region, now has a decision to make. Either you are with us or with the terrorist. From this day forward, any nation that continues to harbour or support terrorism will be regarded by the United States as a hostile regime” (Lee, 2003: 32). Kalimat Presiden Bush inilah yang kemudian menjadi dasar dari munculnya *Bush Doctrine*. Setelah serangan 11 September tersebut, Presiden Bush mengajukan strategi keamanan baru Amerika Serikat

untuk mencegah teroris dan rezim berbahaya untuk mengembangkan, memperoleh, atau menggunakan senjata pemusnah massal.

Tekanan lainnya yang dapat terlihat dengan jelas ialah saat Amerika Serikat melalui Presiden Bush menawarkan bantuan dalam jumlah yang amat besar terhadap Indonesia melalui Presiden Megawati. Penawaran bantuan ini disampaikan oleh Presiden Bush saat kunjungan Presiden Megawati ke Washington beberapa hari setelah terjadinya peristiwa 9/11. Bantuan ini dikatakan Presiden Bush sebagai timbal balik atas dukungan Indonesia terhadap aksi *War on Terror* yang dilancarkan Amerika Serikat. Presiden Megawati memang datang ke Washington juga untuk menuturkan rasa dukanya atas peristiwa 9/11 dan memberikan dukungannya terhadap Amerika Serikat dalam *War on Terror* yang mengecam aksi para teroris. Kunjungan Presiden Megawati selaku presiden Indonesia ke Washington ini dianggap sebagai sebuah kunjungan yang memiliki arti penting bagi Amerika Serikat. Bukan tanpa alasan, kunjungan ini berarti penting karena mengingat fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia (Muttaqien *et al*, 2002: 8). Selain itu, posisi Indonesia sebagai negara yang dalam proses demokratisasi membuat Amerika Serikat tentunya ingin membantu dalam menyebarkan ideologi liberalnya (Denmark, 2010: 15).

Ketidakstabilan Indonesia yang berkepanjangan ini kemudian menjadi salah satu hal yang menyebabkan Presiden Megawati menganggap pentingnya penawaran Presiden George W. Bush tersebut. Bantuan yang akan diberikan oleh Amerika Serikat ini di antaranya ialah dengan total US\$ 657.400.000 dalam bantuan keuangan, yang terdiri dari \$400.000 untuk mendidik warga sipil Indonesia di bidang pertahanan; \$10 juta untuk pelatihan polisi; \$130 juta untuk membantu membiayai reformasi hukum dan peradilan; \$10 juta untuk membantu pengungsi di Maluku; \$5 juta untuk membangun kembali sekolah yang hancur dan infrastruktur lainnya di Aceh; \$2 juta untuk membantu orang Timor Timur yang telah memilih untuk tinggal di Indonesia; \$400 juta untuk meningkatkan perdagangan dan investasi, khususnya di sektor minyak dan gas; serta status bebas bea senilai \$100 juta untuk beberapa produk Indonesia (Febrica, 2010: 573).

Di samping itu, sejak terjadinya serangan 9/11, Amerika Serikat mulai menambah agenda dalam hubungan internasional yang dilakukannya. Agenda baru ini tentunya terkait dengan strategi *counter-terrorism* yang semakin digencarkan oleh Amerika Serikat pasca terjadinya serangan 9/11. Pembahasan mengenai agenda baru Amerika Serikat terkait pencarian pelaku teror 9/11 ini diawali dari dukungan yang didapatkan Amerika Serikat dari negara-negara yang menjalin hubungan baik dengannya. Negara-negara yang memberikan dukungan ini terutamanya ialah aliansi Amerika Serikat yang tergabung dalam North Atlantic Treaty Organization (NATO). Dukungan yang diberikan oleh para anggota NATO menjadi suatu hal yang berharga bagi Amerika Serikat. Dukungan dari NATO ini kemudian menjadi salah satu awal dari serangan yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Afghanistan pada 7 Oktober 2001. Seperti yang dikutip di koran Jawa Pos pada tanggal 14 September 2001, yakni 3 hari setelah serangan 9/11, bahwa Amerika Serikat dengan cara sendiri atau melalui NATO sedang merencanakan serangan besar-besaran terhadap Afghanistan (Jawa Pos, 2001: 14). Dukungan penuh NATO dan Rusia kepada Amerika Serikat ini disampaikan secara resmi dalam komunikasi bersama setelah pertemuan khusus dewan permanen NATO-Rusia pada tanggal 13 September 2001. Pertemuan itu diadakan karena para duta besar NATO menganggap serangan itu juga merupakan serangan terhadap seluruh aliansi Amerika Serikat jika memang direncanakan di luar Amerika Serikat. Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip NATO, yakni serangan terhadap salah satu anggota merupakan serangan terhadap seluruh anggota. Hal ini berarti seluruh aliansi Amerika Serikat mendukung dalam tindakan militer Amerika terhadap mereka yang diduga sebagai pelaku, walaupun tidak seluruh aliansi akan secara langsung ikut terlibat di dalam serangan tersebut.

Selain membawa topik *War on Terror* ini ke dalam pembahasan di NATO, Amerika Serikat juga membawa topik ini untuk dibahas di dalam pertemuan Asia Pacific Economic

Community (APEC). Pertemuan ini diadakan pada bulan Oktober 2001, yakni bulan yang sama dimana Amerika Serikat melakukan serangan ke Afghanistan. Mengangkat topik mengenai serangan 9/11 ialah salah satu hal yang dipersiapkan Presiden Bush untuk pertemuan APEC pada kala itu. Sebagai wadah kerjasama dalam bidang ekonomi, pertemuan para pemimpin negara-negara anggota APEC akan selalu mengangkat ekonomi dan perdagangan menjadi inti dari pertemuan tahunan. Tetapi pada pertemuan kali itu APEC akan memberi Presiden Bush kesempatan untuk berbicara mengenai koalisi *War on Terror*. Sebelum memulai pertemuan rutin tahunan APEC ini, Presiden Bush telah mengatakan bahwa ia akan mengingatkan pemimpin lain di forum APEC tersebut bahwa "kejahatan tidak mengenal batas, tidak ada batasan, dan memberi peringatan bahwa kita harus mengambil sikap, bahwa kita yang telah diberi tanggung jawab jabatan tinggi tidak boleh berpaling dari tugas kita" (CNN, 2001).

Ajakan ini diwujudkan APEC dengan dikeluarkannya Deklarasi Pemimpin-Pemimpin APEC pasca pertemuan APEC di Shanghai, Tiongkok, pada Oktober 2001. Salah satu pernyataan yang dimuat dalam deklarasi ini ialah "Leaders (of APEC) deem it imperative to strengthen international cooperation at all levels in combating terrorism in a comprehensive manner and affirm that UN should play a major role in this regard, especially taking into account the importance of all relevant UN resolutions" (APEC, 2001). Walaupun telah mengeluarkan deklarasi ini, tetapi pembicaraan mengenai terorisme yang diangkat dalam pertemuan tahunan APEC ini tidak sejauh yang Amerika Serikat harapkan, dimana Amerika Serikat berharap dapat membahas mengenai serangan ke Afghanistan (BBC, 2001). Melihat dirinya sebagai badan yang berbasis ekonomi, APEC tidak ingin pembahasan mengenai terorisme ini terlalu dibawa ke ranah politik.

Tidak hanya NATO dan APEC organisasi internasional yang digunakan Presiden Bush sebagai alat penyampaian keinginannya membangun koalisi untuk melancarkan aksi *War on Terror*-nya. Langkah Amerika Serikat juga berlanjut ke wilayah Eropa, yakni melalui Uni Eropa. Inggris, sebagai negara yang memiliki hubungan dekat dengan Amerika Serikat, memberikan dukungan penuh terhadap *War on Terror* yang dilakukan Amerika Serikat. Tidak hanya itu, Inggris juga mendukung penuh serangan balasan Amerika Serikat untuk para pelaku serangan 9/11. Dukungan penuh Inggris juga ditunjukkan melalui diadakannya tur diplomatik Perdana Menteri Inggris pada kala itu, yakni Tony Blair, yang diadakan khusus untuk mengerahkan koalisi internasional untuk mendukung Amerika Serikat (Jawa Pos, 2001). Selanjutnya, pada tanggal 21 September 2001 diadakan KTT darurat Uni Eropa di Brussel, ibukota Belgia, untuk membahas mengenai *War on Terror*. Dalam pertemuan ini, para pemimpin Uni Eropa mengungkapkan solidaritas untuk Washington dan membuat rencana sementara Amerika Serikat menyiapkan pembalasan terhadap para pelaku teror. Diadakannya KTT darurat Uni Eropa tersebut merupakan kelanjutan dari pertemuan yang diadakan para menteri kehakiman dan dalam negeri dari 15 negara anggota Uni Eropa sehari sebelum diadakannya KTT darurat tersebut. Pertemuan tersebut diadakan untuk mendiskusikan usulan bagi kebijaksanaan antiterorisme, termasuk surat perintah tunggal Eropa untuk penahanan dan ekstradisi (Jawa Pos, 2001).

Tekanan Domestik dalam Mempengaruhi Sikap Indonesia Terhadap Serangan Amerika Serikat ke Afghanistan

Masuknya Indonesia ke dalam era baru yang lebih demokratis tidak dapat dipungkiri telah menimbulkan aktor-aktor baru dalam menentukan dan menjalankan perpolitikan di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, aktor-aktor baru yang kemudian berpengaruh dalam pembuatan kebijakan di Indonesia, termasuk di dalamnya ialah kebijakan luar negeri, di antaranya ialah lembaga legislatif, kelompok kepentingan, dan juga opini publik. Ketiganya memiliki pengaruhnya masing-masing dalam mempengaruhi sikap

pemerintah Indonesia dalam menanggapi serangan Amerika Serikat ke Afghanistan pada bulan Oktober 2001. Jatuhnya Presiden Soeharto tidak dapat dipungkiri telah merubah adanya sistem demokrasi di Indonesia. Islam sebagai penekan kekuatan politik di Indonesia muncul kembali ke permukaan dengan ditandai dengan lahirnya berbagai organisasi Islam dan juga partai politik yang berbasis Islam (Muhammad, 2015: 125).

Terdapat setidaknya 3 partai berbasis Islam yang dapat dikatakan memiliki pengaruh cukup besar di dalam parlemen. Partai yang pertama ialah Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sesungguhnya PPP bukan merupakan partai politik baru. PPP berdiri pada tahun 1973 saat rezim Orde Baru masih berdiri. Tetapi pada masa awal berdirinya, PPP bukan merupakan partai yang berbasis Islam, tetapi berbasis pada Pancasila. Saat rezim Orde Baru runtuh dan Hamzah Haz naik menjadi ketua umum, PPP merubah alirannya menjadi partai politik Islam (Muhammad, 2015: 127). Hamzah Haz, sebagai ketua umum PPP dan yang juga menjabat sebagai wakil presiden pada masa pemerintahan Presiden Megawati, dikenal masyarakat akan sikap menentanginya terhadap *War on Terror* yang dilancarkan Amerika Serikat. Wakil Presiden Hamzah Haz telah secara gamblang menyebutkan bahwa ia masuk dalam kalangan oposisi jika ditanyakan mengenai pendapatnya terkait serangan yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Afghanistan (Wise, 2005: 28). Wakil Presiden Hamzah Haz pernah menyebut Amerika Serikat sebagai teroris yang sesungguhnya dengan mengatakan, “actually who is the terrorist? Who is against human rights? The answer is the United States because they attacked other sovereign state. Moreover, it is the terrorist king, waging war” (Muhammad, 2015: 128).

Partai kedua yang memiliki pengaruh dalam parlemen ialah Partai Keadilan (PK). PK merupakan sebuah partai politik baru yang pembentukannya berawal dari perkembangan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) yang terdiri dari mahasiswa-mahasiswa universitas yang beragama Islam. LDK sendiri terbentuk pada awal tahun 1980-an sebagai perwujudan dari aksi pergerakan mahasiswa Islam yang berlangsung selama tahun 1977 hingga 1978. Perkembangan LDK sendiri dapat dikatakan cukup masif, sehingga para alumninya yang tidak lagi berstatus mahasiswa memutuskan untuk membentuk partai politik berbasis Islam pada saat gugurnya rezim Orde Baru di tahun 1998. Senada dengan PPP, PK yang notabene merupakan sebuah partai yang berbasis Islam, memiliki pendapat yang sama terkait dengan isu terorisme dan serangan Amerika Serikat ke Afghanistan. PK dapat dikatakan sebagai partai politik Islam yang aktif dan kritis, terutamanya dalam pembahasan mengenai isu terorisme yang menyangkut Islam. Muttamumul U’la, anggota Komisi III DPR yang juga merupakan anggota PK pada masa itu menyatakan bahwa seluruh serangan teroris yang terjadi tidaklah berhubungan dengan Islam sebagai sebuah agama yang telah dianut banyak individu di seluruh dunia. U’la juga memperingatkan pemerintah Indonesia secara tegas untuk tidak menghubungkan terorisme dengan Islam, terutamanya pesantren-pesantren yang ada di Indonesia (Muhammad, 2015: 129).

Partai politik ketiga yang berpengaruh di parlemen pada masa pemerintahan Presiden Megawati ialah Partai Bulan Bintang (PBB). Partai ini dibentuk pada tahun 1998, sama seperti mayoritas partai politik berbasis Islam lainnya, yakni pada saat rezim Orde Baru berakhir. PBB mengklaim bahwa partai ini merupakan pewaris dari partai politik Islam terbesar pada era Presiden Soekarno, yakni Masyumi. Beberapa mantan anggota Masyumi merupakan penggerak utama PBB. Suara lantang PBB terkait dengan serangan Amerika Serikat ke Afghanistan digambarkan melalui pernyataan Hamdan Zoelva dan Ir. Azrul Azwar dari DPP PBB yang menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyeret George W. Bush sebagai presiden Amerika Serikat ke Mahkamah Internasional dengan statusnya sebagai penjahat perang karena telah melakukan serangan ke Afghanistan (Muttaqien *et al*, 2002: 25).

Selain ketiga partai Islam besar tersebut yang memberikan pengaruhnya di parlemen, terdapat beberapa faktor lain yang membuat parlemen memiliki peran penting dalam mempengaruhi sikap Indonesia atas serangan Amerika Serikat ke Afghanistan. Suara dari

PDI-P yang merupakan partai terbesar di parlemen juga turut mempengaruhi. Sekjen PDI-P, Sutjipto, meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengambil langkah bersama untuk membantu penderitaan rakyat Afghanistan akibat serangan Amerika Serikat. Ia juga menyatakan bahwa PDI-P tidak akan pernah mendukung keterlibatan Indonesia dalam aksi militer yang membantu Amerika Serikat (Muttaqien *et al*, 2002: 24). Senada dengan PDI-P, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga sependapat dalam hal ketidaksetujuannya jika Indonesia melibatkan diri dengan serangan Amerika Serikat ke Afghanistan dalam bentuk dan cara apapun (Muttaqien *et al*, 2002: 25). Selain itu, terbentuknya “Poros Tengah” di dalam parlemen juga turut mempengaruhi keputusan pemerintah. Poros Tengah terdiri dari PKB yang beraliansi dengan Partai Amanat Nasional (PAN) yang notabene merupakan partai politik “sekuler”. Dikatakan “sekuler” karena PAN pada dasarnya menganut nilai-nilai dan unsur-unsur Islam di dalamnya, tetapi tetap mengklaim dirinya sebagai partai politik beraliran sekuler (Muhammad, 2015: 130). Blok Poros Tengah ini kemudian memiliki pengaruh signifikan di dalam parlemen.

Saat Amien Rais menjabat ini lah tekanan parlemen terhadap Presiden Megawati agar mengancam serangan Amerika Serikat ke Afghanistan dan agar mencabut dukungannya terhadap *War on Terror* terjadi. Tidak dapat dipungkiri bahwa status Amien Rais sebagai ketua umum PAN yang berkoalisi dengan partai Islam, dan juga posisinya sebagai ketua MPR membuat suara Amien Rais mudah didengar oleh Presiden Megawati. Di samping Amien Rais, Akbar Tanjung yang menjabat sebagai ketua DPR pada masa tersebut juga menyatakan bahwa pemerintah di bawah Presiden Megawati harus mengambil langkah tegas untuk menanggapi serangan Amerika Serikat ke Afghanistan (Muttaqien *et al*, 2002: 25). Suara dari kedua pemimpin parlemen ini kemudian menggambarkan bahwa tekanan dari para ketua parlemen lah yang kemudian menjadi alasan terbesar Presiden Megawati untuk bersikap mengancam serangan Amerika Serikat ke Afghanistan (Wise, 2005: 28). Penjelasan mengenai peran lembaga legislatif dalam kaitannya dengan serangan Amerika Serikat ke Afghanistan tersebut dapat menggambarkan bahwa tekanan domestik yang diwujudkan dari suara lembaga legislatif sangatlah berpengaruh pada kebijakan luar negeri Indonesia. Hal ini yang kemudian menjadi salah satu pendukung argumen penulis bahwa tekanan domestik menjadi hal yang amat kuat untuk merubah sikap Indonesia terkait serangan Amerika Serikat ke Afghanistan.

Di samping itu, tekanan dari kelompok kepentingan terhadap pemerintah Indonesia juga mempengaruhi keputusan pemerintah. Front Pembela Islam (FPI) menjadi salah satu kelompok kepentingan yang menyuarakan pendapatnya terkait serangan Amerika Serikat ke Afghanistan dengan sangat lantang dan berani. Dalam menanggapi serangan Amerika Serikat ke Afghanistan, FPI tentunya memiliki cara tersendiri untuk mengungkapkan kemarahannya. Bersama dengan Laskar Jihad, FPI memulai aksinya dengan memperingatkan warga negara Amerika Serikat yang berada di Indonesia untuk segera meninggalkan Indonesia (Sukma, 2003: 133). Di samping itu, FPI juga mengancam akan melakukan *sweeping* di hotel-hotel dan area yang ramai akan turis untuk mencari pengunjung asal Amerika Serikat. Pelaksanaan *sweeping* ini dilakukan di berbagai kota di Indonesia. Seakan aksi *sweeping* juga tidak cukup untuk memenuhi amarah FPI akan serangan Amerika Serikat ke Afghanistan, FPI juga mengancam akan merusak fasilitas dan kepentingan Amerika Serikat di Indonesia, seperti kedutaan besar dan konsulat jendral, jika Amerika Serikat tidak kunjung menghentikan serangannya terhadap Afghanistan.

Selain FPI dan Laskar Jihad, Nahdlatul Ulama (NU) juga mengungkapkan ketidaksetujuannya akan serangan Amerika Serikat terhadap Afghanistan. Walaupun tidak tergabung dalam aksi-aksi langsung seperti yang dilakukan FPI dan Laskar Jihad, NU juga tergolong lantang dalam menyuarakan pendapatnya. Hasyim Muzadi, pemimpin NU pada masa itu, mempertanyakan adanya bukti yang kuat atas tuduhan Amerika Serikat terhadap Osama bin Laden sebagai dalang dibalik terjadinya peristiwa 9/11 (Smith, 2003: 456). Kemudian, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan pendapat dan menunjukkan aksi oposisinya terhadap serangan yang dilakukan Amerika Serikat ke Afghanistan. Setelah

Amerika Serikat melakukan serangan terhadap Afghanistan, MUI mengadakan pertemuan yang diikuti oleh wakil-wakil dari setidaknya 32 organisasi Islam yang ada di Indonesia. Setelah diadakannya pertemuan ini, Sekretaris Jendral MUI, Din Syamsuddin, menyatakan bahwa MUI dan organisasi Islam lainnya tentunya mengutuk perbuatan teroris dalam serangan 9/11. Tetapi di sisi lain, MUI juga melantangkan ajakannya untuk umat Muslim di dunia untuk mempersiapkan jihad jika Amerika Serikat tidak juga memberhentikan serangannya ke Afghanistan dengan dalih untuk mencari Osama bin Laden yang diduga sebagai dalang terjadinya serangan 9/11 (van Bruinessen, 2013: 79).

Sejak adanya serangan teroris pada 11 September 2001, media di Indonesia tidak ada hentinya memberitakan hal ini, mulai dari serangannya hingga respon dunia terkait *War on Terror* yang dikeluarkan Amerika Serikat. Salah satu hal yang gencar diberitakan di Koran Jawa Pos selama periode September hingga Oktober 2001 terkait topik ini ialah banyaknya tulisan mengenai pemberangkatan warga Indonesia ke Afghanistan untuk membantu Afghanistan dalam memerangi Amerika Serikat. Pemberitaan ini berawal dari tulisan di Jawa Pos pada tanggal 26 September 2001 yang berjudul "MUI Serukan Jihad, Jika Amerika Jadi Serang Afghanistan". Dalam tulisan ini, MUI mengatakan bahwa sudah seharusnya umat Islam di dunia bersatu menggalang kekuatan untuk membantu Afghanistan sebagai sesama negara Islam berdaulat yang perlu dibela (Jawa Pos, 2001). Contoh berita lainnya ialah yang dimuat pada koran Jawa Pos tanggal 4 Oktober 2001 yang diberi judul "Bush Keras Lagi, Pendaftaran Jihad Terus Berlangsung". Pemberitaan semacam ini tidak dapat dipungkiri malah menyebarkan berita yang semestinya diminimalisir penyebarannya. Dengan pemberitaan pendaftaran relawan yang akan pergi ke Afghanistan untuk membantu negara tersebut melawan Amerika Serikat, tentunya publik akan berpikir bahwa hal ini adalah hal yang benar untuk dilakukan jika melihat banyaknya warga yang antusias untuk mendaftar. Hal inilah yang kemudian digarisbawahi oleh penulis sebagai bukti dari besarnya peran media massa untuk membentuk opini publik.

Media massa di Indonesia pada umumnya tidak menghendaki terjadinya serangan Amerika Serikat ke Afghanistan. Sebagai negara muslim yang berdaulat, Afghanistan dianggap sebagai negara yang tidak layak mendapatkan serangan ini. Koran harian Kompas menulis berita satu hari pasca terjadinya serangan Amerika Serikat ke Afghanistan dengan judul "Serangan yang Tidak Kita Kehendaki Itu Akhirnya Terjadi Juga" (Muttaqien *et al*, 2002: 29). Hal ini kemudian menggambarkan media massa sebagai penyampai suara masyarakat Indonesia cenderung tidak setuju akan serangan yang dilakukan Amerika Serikat ke Afghanistan. Dalam tulisan ini kemudian dimuat bagaimana media menyetujui harapan pemerintah Indonesia bahwa serangan ini dilakukan terhadap sasaran yang terbatas. Lebih lanjut, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga harus mengambil alih dalam memerang terorisme (Muttaqien *et al*, 2002: 29).

Kesimpulan

Diberlakukannya UU mengenai lembaga legislatif, partai politik, pemilu, kebebasan menyampaikan pendapat, hingga media massa di masa itu dapat menjadi bukti adanya proses demokratisasi yang masif pada era Presiden Megawati. Walaupun UU tersebut tidak secara langsung dikeluarkan pada era pemerintahan Presiden Megawati, tetapi tidak adanya perubahan di masing-masing UU menandakan bahwa pada masa itu pemerintah tetap mengakui adanya peran penting dari aktor-aktor tersebut. Adanya kebebasan publik untuk mengemukakan pendapatnya kemudian menjadi salah satu alasan masifnya unjuk rasa yang terjadi terkait suatu isu tertentu, tidak terkecuali isu serangan Amerika Serikat ke Afghanistan. Hal ini kemudian menjadi faktor penting yang mendasari kecaman pemerintah Indonesia terhadap serangan Amerika Serikat ke Afghanistan.

Penelitian ini juga menemukan kenyataan bahwa adanya tekanan-tekanan yang dilakukan Amerika Serikat terkait *War on Terror* yang dilakukannya ternyata tidak kuat untuk mempengaruhi sikap Indonesia untuk terus mendukung Amerika Serikat. Tekanan ini dilakukan Amerika Serikat diantaranya dengan cara mengeluarkan *Bush Doctrine*, memberikan tawaran bantuan untuk Indonesia, hingga membawa agenda terkait *War on Terror* ke organisasi-organisasi internasional. Tekanan Amerika Serikat yang mayoritasnya tidak ditujukan secara spesifik ke Indonesia kemudian menjadi alasan kuat mengapa Indonesia tidak terlalu mempedulikan tekanan yang dilakukan Amerika Serikat ini. Kurang kuatnya tekanan Amerika Serikat ini menjadi salah satu alasan yang dapat dijadikan sebagai latar belakang perubahan sikap Indonesia yang pada akhirnya lebih memenuhi tekanan domestik daripada tekanan Amerika Serikat. Adanya bantuan besar yang rencananya diberikan Amerika Serikat untuk Indonesia sebagai timbal balik atas dukungan Indonesia terhadap *War on Terror* dapat dilihat tidak cukup untuk mempengaruhi Indonesia dalam mendukung serangan Amerika Serikat ke Afghanistan. Padahal semestinya, jika Indonesia sungguh mendukung aksi *War on Terror*, pemerintah Indonesia tidak akan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengecam serangan Amerika Serikat ke Afghanistan. Kecaman Indonesia terhadap serangan Amerika Serikat ke Afghanistan ini kemudian memunculkan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, mengingat hal ini bertolakbelakang dengan dukungan yang telah dikemukakan Presiden Megawati saat berkunjung ke Washington.

Di sisi lain, tekanan domestik yang terlampaui kuat telah diterima Indonesia dari berbagai lapisan masyarakat di dalam negeri yang menyuarakan ketidaksetujuannya akan serangan Amerika Serikat ke Afghanistan. Tekanan domestik ini terlihat mulai dari tekanan yang diberikan lembaga legislatif terhadap presiden, demonstrasi berkepanjangan yang dilakukan masyarakat, hingga media massa yang terkesan menyalahkan dukungan pemerintah terhadap Amerika Serikat. Kekuatan yang dimiliki tekanan domestik ini tentunya berbanding terbalik dengan kekuatan yang dimiliki tekanan yang dilakukan Amerika Serikat. Jika dibandingkan kekuatannya, tekanan domestik secara langsung ditujukan kepada pemerintah Indonesia sebagai *key decision maker*, sedangkan tekanan Amerika Serikat mayoritasnya ditujukan untuk seluruh negara-negara di dunia.

Daftar Pustaka

- Anwar, Dewi Fortuna. 2005. "The Fall of Suharto: Understanding the Politics of the Global" dalam *Southeast Asian Responses to Globalization: Restructuring Governance and Deepening Democracy*, Francis Loh Kok Wah & Joakim Ojendal. Copenhagen: NIAS Press.
- _____. 2010. "The Impact of Domestic and Asian Regional Changes on Indonesian Foreign Policy" dalam *Southeast Asian Affairs*. Singapore: The Institute of Southeast Asian Studies.
- Breuning, Marijke. 2007. *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction*. New York: Palgrave MacMillan.
- CNN. *Bush Arrived in Shanghai for APEC* [online] tersedia di <http://edition.cnn.com/2001/US/10/17/ret.china.bush.apec/index.html> [diakses pada 5 Juni 2017].
- Denmark, Abraham M., et al. 2010. *Crafting A Strategic Vision: A New Era of U.S.-Indonesia Relations*. Center for a New American Security.

- DPR. 2017. Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum [online] tersedia di <http://dpr.go.id/dokjdih/document/uu/467.pdf> [diakses pada 25 Mei 2017].
- _____. 2017. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers [online] tersedia di <http://dpr.go.id/dokjdih/document/uu/441.pdf> [diakses pada 25 Mei 2017].
- Febrica, Senia. 2010. *Securitizing Terrorism in Southeast Asia: Accounting for the Varying Responses of Singapore and Indonesia*. University of California.
- Jacobson, Sid & Ernie Colon. 2008. *After 9/11: America's War on Terror (2001 - _____)*. New York: Hill and Wang.
- Jawa Pos. Taliban Tak Akan Serahkan Usamah. 14 September 2001.
- _____. Blair-Chiraq Dukung Perang. 21 September 2001.
- _____. MUI Serukan Jihad, Jika Amerika Jadi Serang Afghanistan. 26 September 2001.
- Kakailatu, Toeti. 2007. "Media in Indonesia: Forum for Political Change and Critical Assessment" dalam *Asia Pacific Viewpoint*, Vol. 48 No. 1. Victoria University of Wellington.
- Kemenkumham RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1985 [online] tersedia di <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/1985/uu2-1985.pdf> [diakses pada 24 Mei 2017].
- Lee, HeaJeong. 2003. "The Bush Doctrine: A Critical Appraisal" dalam *The Korean Journal of International Relations* Vol. 43, No. 5. Seoul: Chung Ang University.
- Muhammad, Ali. 2015. *Indonesia's Experience in The War on Terror*. (Yogyakarta: The Phinisi Press.
- Muttaqien, M., Siti R. Susanto, & Joko Susanto. 2002. Respon Publik dan Pemerintah Indonesia dalam Menyikapi Serangan Amerika Serikat ke Afghanistan. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Smith, Anthony L. 2003. "A Glass Half Full: Indonesia – U.S. Relations in the Age of Terror" dalam *Contemporary Southeast Asia* 25, no. 3. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS).
- Sorensen, Georg. 2001. *Changes in Statehood: The Transformation of International Relations*. Palgrave Macmillan.
- Sukma, Rizal. 2003. *Islam in Indonesian Foreign Policy: Domestic Weakness and the Dilemma of Dual Identity*. London: Routledge.
- van Bruinessen, Martin. 2013. *Contemporary Development in Indonesian Islam: Explaining the "Conservative Turn"*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS).
- Wise, William M. 2005. *Indonesia's War on Terror*. USINDO: United States – Indonesia Society.